

KOMPARASI SISTEMATIKA DAN BUDAYA EVALUASI PEMBELAJARAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN SECARA KOMPREHENSIF DI NEGARA FINLANDIA DAN INDONESIA

Fita Azkiyatur Rofi'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: fitaa4838@gmail.com

Bhilkizz Nihayatuzzain, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: bilqisnihayatuzzain2@gmail.com

Haris Dwi Fathoni, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: kiem.harisdwifathoni@gmail.com

Indah Aminatuz Zuhriyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: zuhriyah@pgmi.uin-malang.ac.id

Abstract

This research aims to compare the systematics and culture of learning evaluation in Finland and Indonesia. Learning evaluation in Indonesia focuses on the "Kurikulum Merdeka," which emphasizes a holistic approach, particularly in assessing student achievement and knowledge. In contrast, the evaluation systematics in Finland's national curriculum do not include a Minimum Competency Standard (KKM) or National Exams (UN). This research employs a literature review method, revealing significant differences between the evaluation systematics and cultures in Indonesia and Finland. In Finland, learning evaluation is formative and holistic, with a focus on students' continuous development.

Keywords: Islamic Education, Evaluation, Learning, Curriculum, Finland and Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengomparasi sistematika dan budaya evaluasi pembelajaran di negara Finlandia dan Indonesia. Evaluasi pembelajaran di Indonesia tertuju pada Kurikulum Merdeka yang lebih menguatkan pada pendekatan holistik terutama dalam penilaian prestasi dan ilmu pengetahuan siswa, sedangkan sistematika evaluasi pembelajaran dalam kurikulum nasional Finlandia yaitu tidak ada patokan KKM dan juga tidak adanya UN. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, sehingga diketahui sistematika dan budaya evaluasi pembelajaran di Indonesia dan Finlandia memiliki perbedaan yang signifikan di antaranya jika di Finlandia evaluasi pembelajaran

Komparasi Sistemika dan Budaya Evaluasi Pembelajaran pada Lembaga Pendidikan secara Komprehensif di Negara Finlandia dan Indonesia

mereka bersifat formatif dan holistik dengan fokus perkembangan berkelanjutan siswa.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, Evaluasi, Pembelajaran, Kurikulum, Finlandia dan Indonesia

PENDAHULUAN

Pelaksanaan program pendidikan memerlukan suatu hal untuk menjadi tolak ukur dalam mengetahui perkembangan dan perubahan yakni dengan diadakannya program evaluasi secara komprehensif baik mengevaluasi sistem tata pelaksanaan administrasi pendidikan sampai pelaksanaan KBM di ruang kelas. Program evaluasi ini bersifat esensial supaya dalam mengetahui beberapa aspek yang berubah bisa direkap dan menjadi bahan diskusi terkait hal-hal apa saja yang perlu diadakan dalam upaya pembaharuan sistem. Seperti halnya peran guru sebagai pengajar di ruang kelas yang merasa bertanggung jawab atas penyempurnaan pembelajarannya maka wajib baginya mengevaluasi dirinya dalam mengajar sehingga mengetahui beberapa aspek yang perlu dirubah dan diperbaiki.¹ Salah satu aspek yang sangat berdampak untuk kegiatan evaluasi adalah yang berkaitan langsung dengan

murid di ruang kelas yaitu evaluasi pembelajaran sebagaimana merupakan aktualisasi dari kurikulum nasional untuk membentuk karakter anak dan meningkatkan intelektual individu.

Dengan bergantinya kurikulum nasional yang berlaku, konsep evaluasi pembelajaran di Indonesia menjadi isu yang signifikan khususnya imbas dari pergantian Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 menerapkan pembelajaran berbasis keilmuan atau *scientific approach* meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan.² Pembaharuan sistem terlihat pada tujuan pembelajaran dari Kurikulum Merdeka bahwa lebih menguatkan pada pendekatan holistik terutama dalam penilaian prestasi dan ilmu pengetahuan siswa yang mana sebagai tolak ukurnya tidak hanya penilaian akhir tetapi juga proses pembelajarannya selama ini. Penilaian holistik pada Kurikulum Merdeka mengevaluasi intelektualitas anak,

¹ W. James Popham dan Evi L. Baker, *Teknik Mengajar Secara Sistematis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 112.

² Jingga Anisa Astra, Mardiyana, dan Triyanto, "Pendekatan dan Penilaian Pembelajaran pada

Kurikulum 2013 Revisi 2017 yang Mendukung Peningkatan Kemampuan Koneksi Matematis Siswa," *Jurnal Elektronik Pembelajaran Matematika* 5, no. 3 (2018): 287.

keterampilan, pengembangan sosial, emosional dan moral siswa sehingga menghargai keberagaman perkembangan individu dengan mengakomodasi aspek-aspek non akademis yang turut berkontribusi dalam pembentukan karakter secara menyeluruh.³

Sistematika evaluasi pembelajaran di Indonesia sebagai contohnya mengambil pada dua kurikulum yakni aktualisasi evaluasi pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Pada Kurikulum 2013, sistematika evaluasi menentukan suatu patokan kelulusan atau ketuntasan sebagai standar penilaian yakni Kriteria Ketuntasan Minimal atau KKM untuk seluruh mata pelajaran. Adanya konsep KKM tersebut guna mengetahui capaian skor minimal serta sebagai motivasi bagi peserta didik dalam belajar sehingga mencapai pada ketuntasan, namun hal tersebut juga menjadi beban bagi peserta didik sendiri. Bilamana ada yang tidak atau belum tuntas maka melakukan remedial sedangkan yang sudah tuntas maka dilakukan pengayaan lanjut. Sedangkan pada Kurikulum Merdeka diaktualisasikan evaluasinya dengan penyesuaian

kebutuhan dan *skill* peserta didik. Evaluasi pembelajarannya menggunakan konsep penilaian formatif dan sumatif serta diagnosis. Kurikulum Merdeka tidak menggunakan patokan KKM, namun sebagai perubahannya menggunakan konsep penilaian kokurikuler yakni Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang mana penilaian dilakukan sejak awal sampai akhir. Penilaian yang tercatat di antaranya karakter bergotong royong, mandiri dan kebhinekaan global kemudian pemberian skor tersebut dikategorikan apakah belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, atau sangat berkembang.⁴

Sebagai pembanding, Finlandia dikenal dengan sistem pendidikan berkualitas yang menekankan evaluasi pembelajaran sebagai salah satu pilar utamanya. Evaluasi di Finlandia tidak hanya berfokus pada penilaian hasil akademik saja, tetapi juga pada perkembangan holistik siswa. Sistematika evaluasi pembelajaran bagi kurikulum nasional Finlandia yaitu tidak ada patokan KKM dan juga tidak adanya UN namun mereka menerapkan konsep kebijakan *automatic promotion*

³ Sofyan Mustoip, "ANALISIS PENILAIAN PERKEMBANGAN DAN PENDIDIKAN KARAKTER DI KURIKULUM MERDEKA SEKOLAH DASAR," *PANDU: Jurnal Pendidikan Anak dan Pendidikan Umum* 1, no. 3 (2023): 148, <https://doi.org/10.59966/pandu.v1i3.470>.

⁴ Silvia Dwi, "Analisis Perbandingan Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di SD Negeri 6 Pangkalpinang," *EDOIS: International Journal of Islamic Education* 1 (2023): 69.

alias naik kelas secara otomatis. Anggapan mereka ialah *test less learn more*. Kemudian ketika akan memasuki universitas seluruh siswa hanya mengikuti *matriculation examination*.⁵ Pendekatan tersebut mencakup teknik pembelajaran yang inovatif dan menekankan pada kesejahteraan siswa serta dukungan lingkungan belajar yang kondusif. Kurikulum nasional Finlandia mengelola evaluasi pembelajaran dengan fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan individu siswa, yang pada gilirannya berkontribusi pada keunggulan sistem pendidikan mereka.

Ketika membandingkan sistem evaluasi di Indonesia dan Finlandia, terlihat perbedaan mendasar dalam pendekatan dan pelaksanaannya. Di Indonesia, evaluasi seringkali bersifat sumatif dan berpusat pada pencapaian nilai akhir, sementara di Finlandia evaluasi lebih bersifat formatif dengan fokus pada perkembangan berkelanjutan siswa. Faktor-faktor penunjang keunggulan pendidikan di Finlandia meliputi strategi pembelajaran yang adaptif, teknik evaluasi yang holistik, dan dukungan penuh dari kebijakan pendidikan yang berorientasi pada kesejahteraan siswa. Dengan memahami perbedaan ini, diharapkan dapat diambil pelajaran

untuk mengembangkan sistem evaluasi yang lebih efektif dan inklusif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yakni riset yang fokus penelitiannya berintegrasi dengan data dan informasi yang mana data tersebut dikumpulkan melalui pemahaman dan pemeriksaan teori-teori yang relevan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian.⁶ Pada tahapan penelitian melibatkan pengumpulan dari bahan-bahan yang relevan dengan topik yang sedang diteliti, seperti buku, jurnal, serta literatur kemudian membaca secara menyeluruh, menganalisis secara mendalam, mencatat, dan memanfaatkannya secara maksimal. Setelah tahapan tersebut selesai, data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi. Dalam analisis tersebut, peneliti mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang terkandung dalam bahan-bahan tersebut.

Peneliti dapat memperbanyak argumentasinya dengan merujuk pada literatur dan penelitian terdahulu terkait teoritis sistem evaluasi pembelajaran, aktualisasi kurikulum Pendidikan Agama di Indonesia dan

⁵ Himami Absawati, "Telaah Sistem Pendidikan di Finlandia: Penerapan Sistem Pendidikan Terbaik Di Dunia Jenjang Sekolah Dasar," *Center Of Education Journal* 3, no. 1 (2022): 66–67.

⁶ Dkk Adlini, Miza Nina, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6 (2022).

Finlandia berdasarkan masing-masing kebijakan kurikulum nasional, serta sistem dan budaya evaluasi pembelajaran pada kurikulum nasional Indonesia dan Finlandia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistematika Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris "*evaluation*" yang secara harfiah berarti penilaian atau penaksiran. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai keputusan yang dibuat berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian terhadap data yang terkumpul melalui kegiatan asesmen yang diperoleh dari hasil belajar, baik melalui tes maupun non-tes.⁷ Dalam konteks sistem pendidikan, evaluasi adalah proses esensial yang dilakukan untuk memahami sejauh mana pencapaian kinerja dalam proses pendidikan dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Evaluasi melibatkan tahap-tahap pengumpulan data secara bertahap yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi mengenai efektivitas sistem pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan nasional.⁸ Evaluasi

digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah tercapai oleh siswa dengan melibatkan pengawasan, penjaminan, pengendalian, serta penilaian kualitas pendidikan dari setiap komponen, jalur, tingkat, dan jenis pendidikan sebagai bagian tanggung jawab administratif dalam pendidikan.⁹

Evaluasi dianggap sebagai pendekatan efektif untuk meningkatkan proses Pendidikan. Hasil evaluasi pendidikan memberikan informasi tentang pencapaian standar yang kompetitif dalam situasi yang berubah-ubah. Evaluasi pendidikan perlu terus-menerus ditingkatkan secara serius untuk menjawab kebutuhan moral generasi muda bangsa.¹⁰ Adanya suatu evaluasi dalam dunia pendidikan dapat membuat komponen terbaru dari program yang dibawakan oleh Kemendikbud yaitu merdeka belajar yang diatur dalam UUD No 20 Tahun 2003 yang membicarakan mengenai sistem pendidikan nasional yang diantumkan pada pasal 57 sampai 59.¹¹ Dalam pelaksanaannya, proses melakukan evaluasi harus dilakukan dengan

⁷ Arief Aulia Rahman dan Cut Eva Nasryah, *Evaluasi Pembelajaran, Uwais Inspirasi Indonesia*, 2019, 5.

⁸ Taufiq Akbar Al Fajri dkk., "Analisis Kritis Sistem Evaluasi Pendidikan Indonesia," *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies (MJEMIAS)* 1, no. 1 (2022): 8.

⁹ Neni Nurhasanah dkk., "Evaluasi Pembelajaran Dikelas," *Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa* 1, no. 2 (2023): 258.

¹⁰ Ulil Hidayah, "Rekonstruksi Evaluasi Pendidikan Moral Menuju Harmoni Sosial," *Jurnal Pedagogik* 05, no. 01 (2018): 78.

¹¹ Kemendikbud, "Mendikbud Tetapkan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan 'Merdeka Belajar' (2020).

perencanaan yang jelas, dan menggunakan instrumen yang teruji baik dari segi validitas maupun reliabilitasnya sehingga dapat memperoleh suatu kesimpulan yang akurat. Proses evaluasi bukan hanya sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, namun juga digunakan untuk membuat keputusan.

Dalam proses pembelajaran, evaluasi memiliki tujuan utama untuk mengukur efisiensi dan efektivitas berbagai aspek pembelajaran, termasuk tujuan pembelajaran, metode pengajaran, materi pelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, suasana belajar, dan cara penilaian.¹² Guru sebagai tenaga pendidik secara sadar melakukan evaluasi untuk mengkonfirmasi pencapaian belajar siswa serta memberikan informasi tentang efektivitas metode pengajaran yang diterapkan. Dengan demikian, evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana materi pelajaran telah dipahami oleh siswa dan apakah metode pengajaran yang digunakan sudah sesuai dengan harapan.

Menurut Sudirman N. dan rekan-rekannya, tujuan evaluasi dalam proses pembelajaran meliputi pengambilan

keputusan terkait hasil belajar, pemahaman terhadap siswa, serta upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan program pembelajaran.¹³ Seorang guru yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengajarannya perlu melakukan evaluasi terhadap metode pengajaran tersebut. Hal ini penting agar guru dapat mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan.¹⁴ Selain itu, evaluasi terhadap peserta didik juga harus dilakukan secara teratur di dalam kelas selama proses pembelajaran. Evaluasi yang dilakukan harus bersifat terstruktur dan berkelanjutan agar dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kemampuan peserta didik yang dievaluasi.

Maka dalam melakukan proses penilaian pembelajaran harus mengikuti prinsip-prinsip yang mendukung pencapaian kompetensi secara menyeluruh seperti, Pertama, penilaian harus fokus pada pencapaian kompetensi peserta didik dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan mereka. Hal ini menjamin bahwa evaluasi hasil belajar oleh pendidik dapat dipertanggung-

¹² Rahman dan Nasryah, *Evaluasi Pembelajaran*, 8–9.

¹³ Idrus L, "Evaluasi dalam Proses Pembelajaran," *ADAARA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2019): 924.

¹⁴ Ina Magdalena, Hadana Nur Fauzi, dan Raafiza Putri, "Pentingnya Evaluasi dalam

Pembelajaran dan Akibat Manipulasinya," *Bintang: Jurnal Pendidikan dan Sains* 2, no. 2 (2020): 248, <https://doi.org/10.30640/dewantara.v2i1.722>.

jawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Kevalidan penilaian juga penting untuk memastikan bahwa evaluasi mengukur dengan tepat apa yang seharusnya dinilai, dengan menggunakan alat yang sesuai untuk menghasilkan informasi akurat tentang aktivitas belajar. Keadilan dalam penilaian menjamin bahwa semua peserta didik diperlakukan secara adil, tidak memandang latar belakang mereka seperti agama, suku, budaya, atau gender. Penilaian harus dilaksanakan secara objektif, tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas penilai. Proses penilaian harus berkelanjutan, dilakukan secara terencana dan bertahap untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang kemajuan belajar peserta didik. Penilaian juga harus menyeluruh, mencakup semua aspek kompetensi peserta didik dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Transparansi dalam penilaian memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami bagaimana nilai tersebut diperoleh, dasar pengambilan keputusan, serta proses pengolahan nilai secara transparan. Akhirnya, penilaian harus bermakna dengan memberikan informasi yang berguna dan dapat ditindaklanjuti oleh pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat untuk

pengembangan pembelajaran dan evaluasi prestasi belajar.¹⁵

Hal tersebut selaras dengan pendapat Sudijono bahwa terdapat tiga prinsip dasar dalam evaluasi pembelajaran yakni, Pertama, evaluasi harus komprehensif, artinya melibatkan penilaian yang menyeluruh dan tidak parsial terhadap aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Kedua, evaluasi harus dilakukan secara kontinu, yaitu secara teratur dan berkelanjutan untuk memantau perkembangan belajar siswa. Ketiga, evaluasi harus obyektif, yang berarti bebas dari pengaruh atau interpretasi subyektif dalam proses penilaian.¹⁶

Selain prinsip-prinsip yang telah diuraikan mengenai penilaian pembelajaran menurut Sudijono, perlu dicatat bahwa pentingnya konteks dan relevansi dalam proses evaluasi. Evaluasi yang efektif harus mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata siswa, sehingga siswa dapat mengidentifikasi dan mengaplikasikan pengetahuan yang mereka pelajari dalam situasi yang berbeda-beda. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep, tetapi juga memberikan makna yang lebih dalam terkait dengan pembelajaran yang mereka dapatkan. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menjadi alat untuk mengukur

¹⁵ Rahman dan Nasryah, *Evaluasi Pembelajaran*, 15–19.

¹⁶ Asrul, Abdul Hasan Sarigih, dan Mukhtar, *Evaluasi Pembelajaran*, Perdana Publishing (Medan: Perdana Publishing, 2022), 23–24.

pemahaman siswa, tetapi juga untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan pemecahan masalah yang relevan dengan kebutuhan dunia nyata. Dalam konteks ini, guru perlu mempertimbangkan bagaimana mereka dapat mengintegrasikan konteks kehidupan siswa ke dalam strategi evaluasi mereka, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan bagi semua peserta didik.

Pembelajaran dan Sistem Evaluasinya Berdasarkan Kurikulum Nasional Finlandia

Latar Belakang dan Aktualisasi Kurikulum Pendidikan Agama di Finlandia

Pada sejarah peradaban Finlandia mencatat bahwa persebaran agama terbagi atas Kristen Timur dan Barat yang membentuk hubungan antara Gereja dan negara, dan agama Katholik yang dibawa dari Swedia selama lebih dari 600 tahun dari abad ke-13 sampai tahun 1809, serta di era yang sama juga Orthodox berhasil menduduki Finlandia. Karena pertemuan tiga kepercayaan ini menyebabkan konflik dan berakhir pada pembagian wilayah sehingga ketiganya bisa hidup bersamaan di satu tanah negara. Sampai pada tahun 1869 mengeluarkan

hukum Kanon Baru sehingga otonomi Gereja Lutheran meningkat dan berdenominasi pada Kristen Lainnya. Meski begitu jumlah umat Orthodox, Katholik Roma, Yahudi dan Muslim tetap kecil. Kemudian di tahun 1865 sampai 1873 berlaku Undang-undang tentang Pendidikan Sekolah yang mana mulai membantu pemerintahan lokal berdasarkan partisipasi langsung. Saat itulah administrasi gerejawi dan sekuler dipisahkan menjadi dua hal yang berbeda dan pemerintah mengambil alih tugas sekuler seperti perawatan kesehatan dan pendidikan, meskipun pendidikan mulai dipegang oleh pemerintahan pusat tapi tetap tujuan utamanya mengusung dalam membesarkan anak-anak sebagai Kristen sejati dan Gereja terus mengelola pendidikan agama di sekolah.¹⁷ Saat itu satu-satunya minoritas yang baru memiliki pendidikan agama sendiri adalah Orthodox.¹⁸

Barulah di era sekarang Finlandia mulai mengembangkan untuk kurikulum agama dalam Kurikulum Nasional Finlandia oleh Dewan Pendidikan Nasional yang menangani khususnya mata pelajaran di *Peruskoulu* (atau Sekolah Dasar) dan *Lukio* (atau Sekolah Menengah). Dalam

¹⁷ Harri Seine, *Uskonnonopetus Suomen Oppivelvollisuuskoulussa 1900-Luvulla* (Turku: Turun Yliopisto, 2000), 29–30.

¹⁸ Risto Aikonen, *Koulun Ortodoksinen Uskonnonopetus: Haasteellisesta*

Menneisyydestä Uusiin Oppimisympäristöihin (Helsingin Yliopisto: Uskontotieteen Laitos, 2007), 42–43.

pengembangan pendidikan agama memerlukan proses yang panjang sampai melibatkan Dewan Pendidikan Nasional, pemerintah pusat, lembaga pendidikan, dan tokoh agama-agama. Pemunculan dan pengembangan kurikulum ini biasanya terealisasi sesuai kebutuhan masyarakat misalnya penganut salah satu agama yang dominan dalam daerah tersebut. Titik awal pengembangan kurikulumnya adalah Kurikulum Inti Nasional untuk SD secara umum dan tujuan umum pendidikan agama secara khusus (yang terpisah). Kurikulum dasar untuk mata pelajaran agama harus jelas dan sejalan dengan tujuan umum sekolah tidak terafiliasi dengan suatu komunitas agama. Sebagai mana dalam Kurikulum Inti Nasional untuk SD menguraikan tujuan umum pendidikan agama di Finlandia yakni “pendidikan agama menekankan pada pengetahuan agama siswa sendiri dan kesiapan dalam bermultikultural terutama tradisi spiritual (*suomalainen katsomusperinne*) yang berpengaruh dalam masyarakat Finlandia. Tugas pengajaran agama di antaranya memberikan wawasan pengetahuan kepada siswa, keterampilan, experience, serta materi pembentukan identitas diri sendiri dan pandangan dunia”. Lebih rincinya adalah mengenalkan siswa dengan agamanya sendiri dan tradisi budaya Finlandia,

memperkenalkan agama-agama lain, mendidik dalam kehidupan etis dan membantu memahami dimensi etis agama.

Selain tujuan umum pendidikan agama yang telah disebutkan, Kurikulum Inti Nasional untuk SD juga mencantumkan pendidikan agama Lutheran dan Orthodox serta Pendidikan Etika. Di sisi lain untuk kurikulum pendidikan selain Lutheran dan Orthodox tercantumkan pada dokumen yang terpisah oleh Dewan Pendidikan Nasional. Kurikulum pendidikan agama Lutheran dan Orthodox mengulang tujuan umum pendidikan agama di Finlandia yakni memberikan akses pendidikan yang luas dan menyeluruh terkait agama dan pandangan hidup hanya saja keduanya berbeda dalam tujuan utamanya. Untuk fokus Pendidikan Agama Lutheran yakni memperkenalkan siswa dengan berbagai cara pada budaya agama dan mewujudkan faktor utama dari perkembangan dan pertumbuhan siswa, sedangkan untuk fokus Pendidikan Agama Orthodox adalah memperkuat dan mempertahankan identitas Orthodox Siswa.¹⁹ Tercatat bahwa Pendidikan Agama Lutheran Kontemporer mewakili se-macam Kekristenan Umum (*Yleiskristillisyyys*) daripada Lutheran dalam arti yang

¹⁹ Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet, *Oppivelvollisille Tarkoitettu*

Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet (Helsinki: Opetushallitus, 2004), 202.

ketat.²⁰ Sedangkan untuk Pendidikan Agama Orthodox berfokus pada pembentukan jati diri identitas siswa Orthodox yang mana hal ini sangat krusial bagi kelangsungan hidup umat minoritas.²¹

Aktualisasi Pendidikan Agama Lutheran mulai dari kelas 5 pertama berfokus pada pengajaran Alkitab, isu etis, dan kehidupan Gereja Lutheran serja pengenalan inti aqidah. Sedangkan untuk Pendidikan Agama Orthodox di jenjang yang sama juga mencakup tentang pengajaran tahun Gereja dan para santo, makna menjadi anggota Gereja, Alkitab, kehidupan Liturgi dan dogma, serta nilai-nilai etis. Kemudian untuk jenjang kelas 6 hingga 9, Kurikulum Agama Lutheran dan Orthodox memiliki tujuan untuk memperdalam pemahaman siswa tentang agamanya sendiri dan agama lain, serta mendukung pembentukan pandangan dunia dan pandangan etis siswa sendiri. Siswa Finlandia juga memiliki kewajiban untuk mengetahui agama-agama di dunia. Khusus untuk Pendidikan Agama Lutheran mencantumkan beberapa hal dari tradisi spiritual Finlandia yang bertujuan memberikan gambaran umum situasi agama di Finlandia dengan penekanan pada Gereja Lutheran dan Orthodox, gereja-gereja

dan komunitas Kristen lainnya, agama-agama lain dan *non-religius*. Biasanya kegiatan Lutheran seperti tradisi menyanyikan himne dan kegiatan musik lainnya. Lalu pada Pendidikan Etika bersifat multidisiplin termasuk filsafat, ilmu sosial, dan studi budaya yang memiliki tujuan untuk memberikan materi kepada siswa untuk tumbuh menjadi anggota masyarakat yang mandiri, toleran, bertanggung jawab dan bijaksana; mendukung pertumbuhan siswa menjadi warga negara yang penuh dan demokratis, menjadi masyarakat yang mengglobal dan cepat beradaptasi. Pada jenjang kelas 5 awal mencakup pengajaran tentang hubungan manusia dan pertumbuhan moral, pengetahuan diri dan identitas budaya, hak asasi manusia, dan isu-isu lingkungan dan alam. Lalu untuk jenjang kelas 6 sampai 9 tujuan Pendidikan Etika yakni memperdalam pemahaman siswa tentang filosofi hidup mereka sendiri dan konsep dunia bekerja, memberikan informasi dasar tentang pandangan dunia dan agama. Pendidikan Etika ini berfokus pada kewarga-negaraan dan masyarakat yang baik, beragam filosofi, budaya, etika, kehidupan yang baik, masa depan individu, masyarakat dan alam. Kurikulum Pendidikan Etika

²⁰ Markku Pyysiäinen, *Yksi Oppiaine, Seitsemän Opetussuunnitelmaa* (Helsinki: Helsingin Yliopiston Soveltavan Kasvatustieteen Laitos, 2000), 13.

²¹ Kaarina Lyhykäinen, "Praksis Vai Gnoosis?: Ortodoksisen Uskonnon Opettajien Käsitteitä Oppiaineen Tehtävistä," *Teologinen Aikakauskirja* 114, no. 5 (2009): 474–75.

menangani bidang non-religius namun tidak eksplisit merujuk pada pengajaran agama-agama dunia tapi dalam praktisinya melibat-kan agama-agama.

Di luar Pendidikan Agama Lutheran, Orthodox, dan Etika, Kurikulum Inti Nasional juga merujuk pada agama lain yang mana wajib mematuhi prinsip-prinsip Kurikulum Inti Nasional. Agama lain yang dimaksud yakni lima denominasi Kristen di antaranya Katholik, Advent, Gereja Bebas *Herran Kansa* dan *Kristiyhteisö* [Komunitas Kristus]; namun juga mengadakan untuk di luar denominasi Kristen seperti umat Mormon, Yudaisme, Islam dan Baha'i, Buddha dan Hindu. Dalam sistem Pendidikan Agama Kristen (khususnya Lutheran dan Orthodox) terlihat sangat menonjol bahwa ada tujuh kurikulum yang didedikasikan padanya namun di luar itu untuk agama-agama lain hanya satu saja, semisal siswa Muslim mempelajari Pendidikan Agama Islam Umum di sekolah yang diasumsikan oleh pemerintah sesuai dengan umat Islam Sunni dan Syiah bersama-an.²² Kemudian untuk Buddha tidak mengenali perbedaan internalnya juga. Namun berbeda dengan Hinduisme di sekolah-sekolah Finlandia yang mana disediakan satu cabang khusus yakni Krishna Movement. Selain kebijakan

Kurikulum Inti Nasional untuk SD, pemerintah pusat juga mewajibkan untuk menyusun kurikulum lokal mereka yang seharusnya sejalan dengan kurikulum nasional, namun praktiknya tidak selalu terjadi seperti untuk Pendidikan Agama Islam tidak mengikuti standar Kurikulum Dasar Islam yang dibentuk oleh Dewan Pendidikan Nasional.²³

Sistem dan Budaya Evaluasi Pembelajaran di Finlandia

Jika dibandingkan dengan pendidikan negara maju salah satunya adalah Finlandia, akan terlihat beberapa perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan Finlandia. Dalam sejarah, Finlandia telah mencapai puncak dalam sistem pendidikan dan diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Dalam peringkat di negara-negara Anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan secara global, Finlandia berada di peringkat teratas dalam kemampuan siswa dalam membaca, matematika, dan sains. Prestasi ini terungkap dalam tes *Program for International Student Assessment* (PISA). Keberhasilan Finlandia dalam bidang pendidikan sangat mengejutkan Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara di seluruh dunia. Sebelumnya, Finlandia hanya merupakan negara agraris kecil yang tidak terkenal. Tapi sekarang, reputasinya dalam hal prestasi belajar

²² Suaad Onniselkä, *Islamin Opetus Koulussa* (Turku: Savukeidas, 2011), 131-34.

²³ Onniselkä, 133-34.

siswa telah mengun-dang perhatian global.²⁴

Pendidikan di Finlan-dia memiliki beberapa aspek dan aturan yang khas. Setiap provinsi di negara ini menjamin akses penuh bagi semua warga, termasuk pendatang, untuk mendapatkan pendidikan dasar secara gratis. Selain itu, sistem pendidikan di Finlandia menerapkan *compulsory education*, yang berarti semua anak diwajibkan untuk mengikuti pendidikan. Salah satu ciri khas Finlandia adalah penerapan sistem pendidikan sepanjang hayat (*lifelong education*), di mana setiap penduduk diberikan kesempatan belajar secara gratis mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.²⁵ Dengan memberikan akses pendidiki-an gratis kepada semua warganya, termasuk penda-tang, Finlandia berupaya memastikan bahwa semua individu memiliki kesempa-tan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa hambatan finansial.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan utama Pendidikan Finlandia yakni mewujudkan pendidikan tingkat tinggi bagi semua individu. Finlandia

berharap agar seluruh penduduk Finlandia dapat mengakses pendidikan berkualitas mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tingkat lanjutan, dengan adil dan merata, serta dengan kemampuan, keahlian, dan kompetensi terbaik.²⁶ Sistem pendidikan Finlandia memberikan perhatian khusus pada bimbingan siswa yang mengalami kesulitan belajar. Mereka meyakini bahwa hasil terbaik hanya bisa dicapai dengan lebih fokus pada siswa yang membutuhkan dukungan, daripada terlalu fokus pada siswa yang sudah unggul sehingga tidak ada siswa yang merasa tertinggal. Finlandia telah membuktikan bahwa mereka dapat melahirkan siswa berprestasi di bidang akademik tanpa harus terikat pada standarisasi akademik konven-sional.

Finlandia memiliki pende-katan tersendiri terhadap pengu-kuran kemajuan siswa di sekolah. Finlandia tidak menerapkan ujian standar yang biasa disebut "*standardized test*". Sistem pendidikan Finlandia meya-kini bahwa setiap murid memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga melakukan tes standar untuk semua

²⁴ Akhmad Suyono, Andri Eko Prabowo, dan Nurhuda Nurhuda, "Sistem Pendidikan Eropa: Studi Sistem Pendidikan Di Finlandia," *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi* 11, no. 2 (2023): 92.

²⁵ Nograhany Widhi Koesmawardhani, "Profesor Finlandia: Perhatikan Kualitas Pengajaran, Bukan Lamanya Belajar,"

detiknews, 2016, <https://news.detik.com/wawancara/d-3323020/profesor-finlandia-perhatikan-kualitas-pengajaran-bukan-lamanya-belajar>.

²⁶ Absawati, "Telaah Sistem Pendidikan Di Finlandia: Penerapan Sistem Pendidikan Terbaik Di Dunia Jenjang Sekolah Dasar," 66.

murid tidak akan meng-hasilkan kualitas pendidikan yang baik.²⁷ Di Finlandia, tingkat Sekolah Dasar tidak melibatkan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).²⁸ Fokus utama adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang tidak terlalu berorientasi pada tes, sehingga siswa dapat berkonsentrasi pada proses pembelajaran dan pengembangan diri secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan penekanan Finlandia pada kesejahteraan mental dan emosional siswa, serta memungkinkan mereka untuk tumbuh menjadi individu yang seimbang dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

Finlandia menganut prinsip "Kurangi Tes, Lebih Banyak Belajar" (*Test Less Learn More*). Mereka menganggap bahwa terlalu banyak ujian hanya mengarah pada situasi di mana guru lebih fokus pada persiapan siswa untuk lulus ujian semata. Tujuan belajar seharusnya lebih dari sekadar mencapai nilai akademik yang baik dan istimewa.²⁹ Mereka percaya bahwa "pendidikan yang baik tidak hanya tergantung pada hasil yang baik". Oleh karena itu, penggunaan tes standar di

Finlandia hanya digunakan sebagai acuan, bukan sebagai landasan utama dalam penilaian siswa. Mereka mengang-gap bahwa penggunaan tes standar hanya menghabiskan biaya yang besar setiap tahunnya untuk pembuatan soal ujian, sementara hanya beberapa individu yang mendapat manfaat darinya.

Pada usia 18 tahun, siswa di Finlandia hanya perlu mengikuti ujian kualifikasi (*matriculation examination*) jika mereka berniat melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun, hanya sekitar dua pertiga siswa lulusan SMA yang memilih untuk melanjutkan pendidikan mereka di perguruan tinggi. Sisanya memilih untuk langsung memasuki dunia kerja.³⁰ Bagi siswa yang memilih langsung memasuki dunia kerja, mereka dapat mencari pekerjaan atau mengikuti pendidikan kejuruan untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan dalam bidang pekerjaan tertentu. Hal ini mencerminkan fleksibilitas dalam sistem pendidikan Finlandia yang memungkinkan siswa memilih jalur yang sesuai dengan minat, bakat, dan tujuan karir mereka setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

²⁷ Suyono, Prabowo, dan Nurhuda, "Sistem Pendidikan Eropa: Studi Sistem Pendidikan Di Finlandia."

²⁸ Ahmad Tarmizi Hasibuan dkk., "Implementasi Sistem Pendidikan Terbaik Dunia di Jenjang Anak Usia Dasar Telaah Sistem Pendidikan Finlandia," *Jurnal Pembelajaran dan*

Matematika Sigma (Jpms) 9, no. 1 (2023): 133–36.

²⁹ Tas'adi Rafsel, "Pentingnya Etika dalam Pendidikan," *Ta'dib* 17, no. 2 (2014): 189–98, <https://doi.org/10.31958/jt.v17i2.272>.

³⁰ *Ibid.* 92

Komparasi Sistematis dan Budaya Evaluasi Pembelajaran pada Lembaga Pendidikan secara Komprehensif di Negara Finlandia dan Indonesia

Siswa di Finlandia juga tidak diberi beban yang berat dalam hal PR (Pekerjaan Rumah), berbeda dengan kebijakan di Indonesia dahulu yang seringkali memberikan pekerjaan rumah agar siswa tetap belajar di rumah. Munculnya Kurikulum Merdeka yang dipraktikkan di beberapa lembaga di Indonesia saat ini sudah mulai menghilangkan pekerjaan rumah. Di Finlandia, batas maksimum waktu yang diperuntukkan untuk pengerjaan tugas adalah hanya 30 menit per hari. Prinsip yang mereka anut adalah "PR tidak membuatmu pintar".³¹ Dengan menghapus beban tugas yang berat, Finlandia telah menciptakan lingkungan belajar yang lebih seimbang dan ramah bagi siswa. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga, teman, dan aktivitas lain yang penting bagi perkembangan.

Sistem perangsangan seperti yang diterapkan di Indonesia telah dihapus di negara Finlandia, hal ini karena dianggap memiliki dampak negatif yang lebih besar daripada dampak positif yang diperoleh. Finlandia sangat memahami akan pentingnya kesejahteraan mental siswa. Peringkat

siswa dan penentuan kemajuan ke kelas berikutnya menjadi dilema bagi guru, karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh siswa yang merasa malu dan kecewa, tetapi juga oleh guru dan orang tua.³² Keputusan Finlandia untuk menghapus sistem peringkat siswa merupakan langkah yang bijaksana dan sangat selaras dengan prioritas utama sistem pendidikan, yaitu memprioritaskan kesejahteraan mental dan emosional peserta didik.

Di samping itu, pemerintah Finlandia mewajibkan adanya fasilitas bimbingan dan konseling untuk siswa. Perhatian yang luar biasa diberikan kepada siswa yang mengalami gangguan psikologis dan masalah kesehatan mental.³³ Hal ini tidak hanya membantu siswa yang mengalami masalah, tetapi juga menciptakan budaya di mana kesejahteraan mental dianggap sama pentingnya dengan prestasi akademik. Finlandia berupaya memastikan bahwa siswa tidak hanya terdidik secara intelektual, tetapi juga tumbuh menjadi individu yang sehat secara mental dan emosional, siap menghadapi tantangan di masa depan.

Finlandia juga telah menghapus sistem tinggal kelas dengan alasan

³¹ Suyono, Prabowo, dan Nurhuda, "Sistem Pendidikan Eropa: Studi Sistem Pendidikan Di Finlandia."

³² Noviyanti Urfah, Wirda Adelia, dan Nur Syamsiyah, "Analisis Perbandingan Sistem Evaluasi Pendidikan pada Kurikulum 2013 dan Pendidikan di Finlandia," *Eduscience: Jurnal*

Ilmu Pendidikan 7, no. 02 (2022): 117, <https://doi.org/10.47007/edu.v7i02.5540>.

³³ Maulana Amirul Adha dkk., "Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia dan Finlandia," *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan* 3, no. 2 (2019): 145, <https://doi.org/10.29240/jsmp.v3i2.1102>.

bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda dan tidak dapat disamaratakan. Mereka menyadari bahwa siswa dapat memiliki kecepatan belajar yang beragam, dan menerapkan sistem tinggal kelas dapat menyebabkan ketidakmerataan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Pemerintah Finlandia memilih untuk tidak menerapkan sistem tinggal kelas seperti yang ada di Indonesia, dan menganut kebijakan "*automatic promotion*" dimana siswa naik kelas secara otomatis.³⁴ Dalam sistem ini, guru-guru di Finlandia diminta untuk selalu siap membantu siswa yang tertinggal sehingga semua siswa dapat naik kelas.³⁵

Dengan mengesampingkan sistem peringkat, Finlandia telah memberikan sinyal yang kuat bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk mengembangkan individu yang utuh, bukan hanya mencetak lulusan yang unggul secara akademis. Finlandia dapat menjadi contoh bagi seluruh Lembaga sekolah, siswa, guru, dan orang tua bahwa sekolah adalah tempat di mana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara kompre-hensif, baik secara intelektual, emosional, maupun sosial.

Pembelajaran dan Sistem Evaluasinya Berdasarkan Kurikulum Nasional Indonesia

³⁴ *Ibid.*

Aktualisasi Kurikulum Pendidikan Agama di Indonesia

Pendidikan agama di Indonesia teraktualisasikan dengan dibentuknya kurikulum pendidikan sendiri yang dibentuk oleh pemerintah yakni Kementerian Agama Republik Indonesia dengan merancang sekaligus untuk enam agama resmi Indonesia di antaranya Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Chu. Konsep aktualisasi pendidikan agama di Indonesia berbeda dengan Finlandia yang mana karena pengaruh dari budaya dan filosofis yang mana memang dari dulu Indonesia sangat kuat akan kepercayaan sampai suatu ajaran agama direalisasikan bersamaan dengan aktivitas sehari-hari bahkan sampai bisa menjadi kebudayaan yang bersifat berkesinambungan. Jika di Finlandia kurikulum pendidikan agama yang diprioritaskan agama Lutheran dan Orthodox, maka di Indonesia yang terkenal juga memiliki cabang ilmu keagamaan adalah Islam yang mana antara pembelajaran untuk umum dengan khusus sekolah agama berbeda sistematis dan kurikulum yang berlaku.

Membicarakan Pendidikan Agama Islam, Ahmad Supardi berpendapat bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan suatu pendidikan yang berlandaskan langsung pada ajaran Islam atau Al-Quran sebagai

³⁵ Adha dkk., "Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia dan Finlandia."

tuntunan agama dalam membina dan membentuk pribadi Muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, cinta kasih sayang pada orang tua dan sesama manusia serta tanah airnya sebagai karuna atas pemberian Tuhan.³⁶ Jadi secara teori Pendidikan Agama Islam memiliki tujuan untuk menebarkan cinta dan kasih serta sebagai pendidikan bagi pribadi setiap individu yang selalu terikat dengan aturan atau syariah yang berlandaskan langsung pada kitab suci Al-Quran. Selain sebagai penyebar kasih, Harun Nasution juga berpandangan bahwa Pendidikan Agama Islam diadakan untuk membina ahlak meskipun judul mata pelajarannya agama tidak akan tergantikan dengan pelajaran akhlak ataupun etika.³⁷

Keberadaan Pendidikan Agama Islam bagi Kurikulum Nasional Indonesia merupakan aktualisasi atas ideologi negara yakni Pancasila dengan lima sila, dan sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar yuridis Pendidikan Agama Islam³⁸ yang diterapkan dalam Kurikulum Nasional untuk seluruh pelaksana lembaga pendidikan. Sila pertama memiliki makna bahwa setiap

warga Indonesia berhak menjalankan kepercayaannya masing-masing dan hidup dibawah lindungan Undang-undang se-hingga kewajiban bagi masyarakat adalah saling menjaga kerukunan dan hidup bermasyarakat aman dan tentram.

Pendidikan Agama Islam di Indonesia menerapkan dua konsep penerapan yakni sebagai pembelajaran di sekolah umum atau formal, dan sebagai pembelajaran informal di luar jam sekolah. Dalam penerapannya di sekolah pun juga terbagi lagi menjadi dua yakni PAI dalam sekolah umum dan PAI dalam konsep madrasah (sekolah Islam beradaptasi). Hal ini memang sudah lumrah terlaksana bahkan di sejumlah negara bahwa khusus Pendidikan Agama Islam memiliki lembaga pendidikan yang terpisah sehingga pembelajaran yang diadakan terfokus pada pelajaran agama tergantung dari lembaga pendidikannya apakah ada integrasi dengan ilmu pengetahuan umum atau tidak. Untuk yang berada di Indonesia, Pendidikan Agama Islam oleh Kementerian Agama membentuk kurikulum yang berbeda juga dari Kemendikbud yang mana atas

³⁶ Ahmad Tafsir, *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2004), 285.

³⁷ Syahidin, *Aplikasi Metode Pendidikan Qurani dalam Pembelajaran Agama di Sekolah* (Tasikmalaya: Ponpes Suryalaya Tasikmalaya, 2005), 20.

³⁸ Koko Adya Winata, Uus Ruswandi, dan Bambang Samsul Arifin, "Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Kurikulum Nasional," *Attractive : Innovative Education Journal* 3, no. 2 (2021): 146, <https://doi.org/10.51278/aj.v3i2.248>.

perbedaan tersebut Kementerian Agama mendirikan konsep sekolah Islam atau disebut dengan madrasah yang mencakup jenjang bawah sampai atas di antaranya Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah (jenjang SD), Madrasah Tsanawiyah (jenjang SMP), Madrasah Aliyah (jenjang SMA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (jenjang SMK).³⁹ Madrasah yang diusung oleh Kementerian Agama merupakan sebuah konsep pendidikan yang mengintegrasikan antara ilmu dan pembelajaran Islam dengan ilmu pengetahuan umum, konsep tersebut yang mem-bedakan lembaga pendidikan Islam berasrama yakni Pondok Pesantren yang dikelola oleh yayasan sendiri. Meskipun berkonsep madrasah, tetap saja memprioritaskan pada ilmu agama alih-alih materi pelajaran umum. Ilmu Islam yang diajarkan dalam Madrasah di antaranya ada bidang Al-Quran Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab.⁴⁰ Hal ini serupa dengan pendidikan agama di Finlandia yang mana umat terbesarnya adalah agama Lutheran maka khusus Pendidikan Agama Lutheran memiliki tujuh kurikulum sendiri daripada pendidikan agama lainnya di sana.

³⁹ Afida Nurrisqi, "Karakteristik Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Prespektif Kebijakan Pendidikan," *Bintang: Jurnal Pendidikan Sains* 3, no. 1 (2021): 125.

Pendidikan Agama Islam di Indonesia masuk pada Kurikulum Nasional dan menjadi pelajaran wajib sehingga di era sekarang mulai diberikan kebijakan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasa 37 ayat 1 dan 2. Kemudian untuk Pendidikan Agama Islam di Madrasah di bawah naungan Kementerian Agama juga diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 165 Tahun 2014 yang berubah menjadi KMA Nomor 183 Tahun 2019. Pengembangan yang mulai diusung untuk aktualisasi Pendidikan Agama Islam di sekolah yakni pengembangan pola pikir pendidikan yang berpusat pada siswa, guru berperan sebagai fasilitator bagi siswa, penguatan sumber belajar yang interaktif, pola belajar jejaring, aktif mencari pentingnya belajar sendiri dan pola belajar berbasis media.⁴¹

Sistem dan Budaya Evaluasi Pembelajaran di Indonesia Evaluasi Pendidikan Nasional

Dalam sistem pendidikan diperlukan adanya suatu evaluasi. Pendidikan memiliki peranan yang sangat fundamental karena suatu pendidikan adalah sebuah seni dari

⁴⁰ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 55-56.

⁴¹ Nurrisqi, "Karakteristik Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Prespektif Kebijakan Pendidikan," 127.

kemajuan bangsa dan mempunyai suatu peranan yang bersifat signifikan terhadap proses kemajuan bangsa. Oleh karenanya sangatlah dibutuhkan evaluasi karena berpengaruh terhadap kualitas pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan oleh negara. Beberapa permasalahan yang menjadi penyebab merosotnya kualitas pendidikan yaitu adanya suatu konstitusi politik yang belum selaras dengan tujuan pendidikan, lemahnya sektor manajemen dalam Pendidikan, adanya kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan dari desa dan kota, kurangnya dukungan dari pemerintah, rendahnya kualitas sumberdaya mengajar yang dimiliki oleh guru, dan lemahnya sistem evaluasi pembelajaran. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan sebuah evaluasi terhadap sistem pendidikan. Evaluasi ini dilaksanakan oleh lembaga mandiri, yang dilakukan secara bertahap mencakup keseluruhan, bersifat jelas atau transparan, dan terstruktur dalam menafsirkan suatu standar nasional Pendidikan.⁴² Selain itu, juga diperlukan adanya perbaikan dengan adanya masalah-masalah tersebut. Karena dalam penyelenggaraan pendidikan akan selalu berkaitan

dengan komponen-komponen seperti contoh, pendanaan biaya sekolah oleh pemerintah, guru yang profesional, bahan ajar yang mendukung keberhasilan peserta didik, dan sumber daya manusianya. Sistem evaluasi yang berjalan dengan baik akan mampu menggambarkan sistem pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang ada di Indonesia.

Sistem pendidikan di Indonesia memiliki karakteristik uniknya sendiri dalam konteks komposisi pendidikan yang tidak selalu sebanding dengan negara-negara lain. Persaingan dan pengembangan potensi individu berbeda dengan paradigma yang diterapkan di Indonesia, yang lebih menekankan kesetaraan dalam akses Pendidikan.⁴³ Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), telah mengimplementasikan Asesmen Nasional (AN) sebagai langkah pengganti Ujian Nasional (UN). AN ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas pendidikan secara menyeluruh dengan lebih terintegrasi dan berfokus pada pengembangan mutu. Berbeda dengan UN yang lebih berorientasi pada hasil akhir, AN menilai kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi, serta karakter peserta didik dan kualitas

⁴² T a Al Fajri dkk., "Analisis kritis sistem evaluasi pendidikan Indonesia," *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies (MJEMIAS)* 1, no. 1 (2022): 2.

⁴³ Adi Suprayitno dan Wahid Wahyudi, *Pendidikan Karakter di Era Milenial* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

lingkungan belajar. Melalui hasil AN, pihak pendidikan dapat mengidentifikasi masalah-masalah utama dan merancang perbaikan yang efektif berdasarkan data yang terkumpul. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih holistik dan akurat tentang kondisi pendidikan di Indonesia, serta mendukung implementasi Kurikulum Merdeka untuk pembelajaran yang lebih berorientasi pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa.⁴⁴

Evaluasi pendidikan di Indonesia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan. Dengan adanya evaluasi ini, pemerintah dapat mengidentifikasi dan mengatasi berbagai masalah yang memengaruhi pendidikan, seperti perbedaan sarana dan prasarana antara daerah perkotaan dan pedesaan, kurangnya dukungan keuangan, serta rendahnya kualitas pengajaran guru. Evaluasi dilakukan secara terstruktur dan transparan oleh lembaga independen dengan tujuan untuk memastikan bahwa standar pendidikan nasional tercapai dengan baik. Selain itu, pengenalan Asesmen Nasional (AN) sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) merupakan langkah positif untuk mengevaluasi kompetensi dasar dan karakter siswa, serta

meningkatkan mutu pembelajaran secara menyeluruh sesuai dengan visi Kurikulum Merdeka. Dengan demikian, evaluasi pendidikan tidak hanya berfokus pada hasil akhir tetapi juga pada proses pembelajaran yang holistik dan inklusif, mendukung upaya transformasi pendidikan di Indonesia.

Evaluasi dalam Proses Pembelajaran

Indonesia memiliki beragam jenis evaluasi pembelajaran, beberapa diantaranya adalah penggunaan tes sebagai instrument evaluasi. Tes, yang berasal dari bahasa Perancis Kuno "*testum*", yang artinya piring untuk menyisihkan logam mulia, dan dalam bahasa Inggris disebut "*test*", diartikan dalam konteks bahasa Indonesia sebagai "ujian" atau "percobaan". Secara umum, tes adalah alat pengukur dengan standar obyektif untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu.⁴⁵ Menurut Ismail, tes adalah suatu instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang karakteristik suatu objek, seperti kemampuan, minat, motivasi siswa, dan sebagainya. Dengan demikian, teknik tes dalam konteks pembelajaran adalah metode untuk mengumpulkan data guna mengevaluasi pencapaian hasil belajar

⁴⁴ Kemendikbud, "Mendikbud Tetapkan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan 'Merdeka Belajar,'" kemdikbud.go.id, 2019, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/20>

19/12/mendikbud-tetapkan-empat-pokok-kebijakan-pendidikan-merdeka-belajar.

⁴⁵ Rahman dan Nasryah, *Evaluasi Pembelajaran*, 19.

siswa menggunakan alat tes.⁴⁶ Dalam evaluasi pendidikan, tes merupakan prosedur untuk mengukur dan menilai, menggunakan berbagai tugas atau pertanyaan, sehingga menghasilkan nilai yang mencerminkan prestasi atau tingkah laku peserta ujian.

Fungsi tes dalam konteks kelas meliputi diagnosis kesulitan belajar, evaluasi kesenjangan antara bakat dan pencapaian, dan peningkatan prestasi siswa. Tes juga membantu dalam pengelompokan siswa untuk kegiatan kelompok dan perencanaan pembelajaran individu.⁴⁷ Proses penyusunan tes melibatkan langkah-langkah seperti menetapkan tujuan pengujian, membatasi materi yang diujikan, dan merumuskan tujuan instruksional spesifik.⁴⁸ Penggunaan tes juga memiliki fungsi tersendiri, Scriven membagi fungsi evaluasi menjadi dua yakni fungsi formatif dan sumatif. Fungsi evaluasi formatif bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap bagian-bagian yang sedang dikembangkan berdasarkan hasil evaluasi. Sementara fungsi evaluasi sumatif berkaitan dengan melakukan penilaian terhadap keseluruhan sistem

untuk menyimpulkan keberhasilannya. Evaluasi sumatif hanya dilakukan setelah pengembangan program pembelajaran dianggap telah selesai.⁴⁹

Dalam pendidikan, terdapat beberapa teknik tes yang umum digunakan untuk mengevaluasi kemampuan siswa. Pertama, tes lisan dilakukan dengan memberikan pertanyaan langsung kepada siswa untuk mengukur kemampuan verbal mereka. Kedua, tes tertulis mengharuskan siswa menjawab pertanyaan secara tertulis untuk menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi secara rinci. Terakhir, tes perbuatan atau unjuk kerja melibatkan siswa dalam melakukan tindakan atau demonstrasi langsung untuk menguji kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari. Teknik-teknik ini membantu guru untuk menilai berbagai aspek kemampuan siswa secara komprehensif.⁵⁰

Di Indonesia, penilaian hasil belajar siswa tidak selalu harus menggunakan tes sebagai satu-satunya metode. Teknik non-tes merujuk pada metode evaluasi yang dilakukan melalui pengamatan sistematis

⁴⁶ Muhammad Ilyas Ismail, *Evaluasi pembelajaran: Konsep Dasar, Prinsip, Teknik dan Prosedur*, ed. oleh Prajna Vita (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020), 5.

⁴⁷ Rahman dan Nasryah, *Evaluasi Pembelajaran*, 21.

⁴⁸ Rahman dan Nasryah, 22.

⁴⁹ Nurhasanah dkk., "Evaluasi Pembelajaran Dikelas."

⁵⁰ Sawaluddin dan Muhammad Sidiq, "Langkah-Langkah dan Teknik Evaluasi Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam," *Jurnal PTK & Pendidikan* 6, no. 1 (2020): 13-24, <https://doi.org/10.18592/ptk.v6i1.3793>.

terhadap kemajuan belajar siswa. Pendekatan ini tidak melibatkan penggunaan tes untuk mengumpulkan informasi mengenai progres belajar siswa.⁵¹ Teknik evaluasi non tes memungkinkan pengamatan sistematis untuk menilai aspek kepribadian, sikap, dan tingkah laku siswa, baik secara individu maupun dalam kelompok. Penggunaan tehnik ini penting dalam mengevaluasi domain avektif dan psikomotorik, sementara tes lebih umum digunakan untuk mengukur pencapaian kognitif. Beberapa jenis evaluasi non tes meliputi skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan, dan riwayat hidup.⁵²

Pertama, skala ber-tingkat memberikan penilaian dalam bentuk angka dengan rentang yang sama, menggambarkan nilai dari yang rendah hingga tinggi untuk berbagai aspek. *Kedua*, kuesioner atau angket digunakan untuk mengumpulkan pendapat, pengetahuan, atau sikap siswa dengan pertanyaan tertutup atau terbuka. *Ketiga*, daftar cocok meminta siswa untuk memilih jawaban yang sesuai dari serangkaian pernyataan singkat. *Keempat*, wawancara, baik bebas maupun terpimpin,

memungkinkan pengumpulan informasi melalui dialog antara penilai dan siswa. Kelima, pengamatan dilakukan secara sistematis atau eksperimental untuk mengamati perilaku siswa. Terakhir, riwayat hidup memberikan gambaran tentang perkembangan dan karakteristik siswa dari masa lalu hingga sekarang. Dengan memahami berbagai teknik ini, pendidik dapat menilai kemajuan siswa secara menyeluruh dan objektif sesuai dengan berbagai aspek yang diinginkan.

Dalam praktiknya, Indonesia memiliki sistem penilaian yang sangat beragam untuk mengukur sejauh mana siswa dapat memahami materi yang disampaikan. Beberapa diantaranya adalah penilaian harian, penilaian ini biasanya dilakukan oleh guru di kelas untuk mengukur pemahaman materi terhadap siswa. Hal ini dilakukan oleh guru dalam bentuk pemberian pekerjaan rumah (PR) kepada siswa untuk mengetahui ketercapaian siswa dalam memahami materi pelajaran dan evaluasi kegiatan sehari-hari di dalam kelas.⁵³ Sistem evaluasi berikutnya adalah adanya Ujian sekolah, Penilaian Tengah Semester (PTS), Penilaian Akhir Semester (PAS), dan Ujian Nasional

⁵¹ H Bisri dan M Ichsan, "Penilaian Otentik dengan Teknik Nontes di Sekolah Dasar Authentic Assessment with Nontest Technique in Primary School," *Jurnal Sosial Humaniora* 6, no. 5 (2015): 81–93.

⁵² Rahman dan Nasryah, *Evaluasi Pembelajaran*, 28.

⁵³ Urfah, Adelia, dan Syamsiyah, "Analisis Perbandingan Sistem Evaluasi Pendidikan pada Kurikulum 2013 dan Pendidikan di Finlandia," 116.

(UN). Di Indonesia, sistem ulangan harian diberikan untuk penilaian harian siswa yang nantinya akan dibagi dengan nilai akhir semester guna memenuhi penilaian di raport. Pertengahan semester diadakan PTS untuk mengevaluasi siswa serta dijadikan nilai tambahan untuk nilai akhir semester.⁵⁴ Sistem evaluasi yang begitu banyak dari tahun ke tahun terus menuai pro dan kontra. Ada yang setuju dan lebih banyak yang tidak dengan diterapkannya ujian-ujian di sekolah. Model evaluasi melalui ujian memang sangat rasional untuk meninjau dan mengukur kualitas tiap siswa. Namun, satu masalah yang sering kali dikritik para pakar Pendidikan adalah soal dijadikannya hasil sebagai penentu lulus tidaknya seorang siswa dalam mengikuti pelajaran.

Selain melaksanakan penilaian dengan memberikan soal-soal kepada siswa, Pendidikan di Indonesia juga menerapkan sistem Rangkings dan memiliki kebijakan bahwa tidak semua siswa dapat naik kelas. Hal tersebut dilakukan dengan harapan memotivasi para siswa dan menciptakan budaya kompetisi untuk meningkatkan kualitas siswa.⁵⁵ Bagi siswa yang memiliki kemampuan intelektual memang baik, hal ini dapat memacu untuk lebih giat lagi, namun bagi siswa yang

kemampuannya di bawah rata-rata akan kesulitan dan merasa terbelakang karna adanya sistem perangkings. Perangkings bukan hanya 10 besar namun dari tertinggi hingga terendah diukur untuk mengetahui seberapa cerdas siswa di antara teman sekelasnya, hingga mengukur antar kelas. Dapat dinilai bagaimana siswa yang mendapat peringkat terakhir di kelasnya, ia akan mendapat teguran dari guru, orang tua, bahkan *dibully* oleh teman-temannya karena dianggap bodoh dan terbelakang

Di tengah kompleksitas sistem evaluasi pendidikan di Indonesia, perlu dipertimbangkan bahwa tujuan utama dari evaluasi seharusnya bukan hanya untuk mengukur kemampuan siswa secara akademis, tetapi juga untuk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh. Meskipun ujian dan sistem peringkat dapat memberikan gambaran tentang prestasi siswa dalam konteks tertentu, kita perlu menjaga agar evaluasi tidak hanya mengukur "hasil akhir", tetapi juga proses pembelajaran yang berkelanjutan dan mendalam. Evaluasi yang lebih holistik dan inklusif dapat melibatkan metode penilaian yang lebih variatif, seperti portofolio, proyek kolaboratif, atau penugasan berbasis keterampilan yang dapat mencerminkan beragam

⁵⁴ Kurikulum Dan dan Pendidikan Di, "ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM EVALUASI PENDIDIKAN PADA" 7, no. 1991 (2022).

⁵⁵ Urfah, Adelia, dan Syamsiyah, "Analisis Perbandingan Sistem Evaluasi Pendidikan pada Kurikulum 2013 dan Pendidikan di Finlandia," 117.

kemampuan siswa. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia dapat bergerak menuju sistem evaluasi yang lebih adil dan mendukung bagi semua siswa, memungkinkan mereka untuk berkembang sesuai dengan potensi unik mereka tanpa terjebak dalam tekanan peringkat semata.

KESIMPULAN

Aktualisasi pendidikan beserta sistematika evaluasi pembelajarannya memiliki perbedaan yang signifikan antara di Indonesia dengan Finlandia yang mana terangkum menjadi empat. Pertama dalam pelaksanaan kurikulum Pendidikan Agama di Finlandia yang mana lebih berfokus pada Pendidikan Agama Lutheran dan Orthodox dengan tujuan utamanya memperkenalkan peserta didik kepada agama dirinya sendiri dan tradisi budaya Finlandia sebab pendidikan agama menurut Finlandia merupakan suatu pendalaman identitas dan pandangan hidup siswa serta memberikan pemahaman etis dan multikultural. Sebagai contohnya yakni Pendidikan Agama Lutheran mendalami tentang Alkitab, isu etis dan kehidupan Gereja Lutheran. Sedangkan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Agama di Indonesia teraktualisasikan dengan afiliasi pihak Kementerian Agama RI, yang mana pendidikan agama di Indonesia langsung membuat kurikulum sekaligus kepada enam agama yakni Islam, Kristen, Katholik,

Hindu, Buddha dan Khong Hu Chu. Ada kesamaan dengan Finlandia yakni mengoptimalkan pendidikan agama yang umatnya mendominasi seperti di Finlandia didominasi Kristen Lutheran dan Orthodox maka di Indonesia didominasi Muslim. Sebagai tujuannya, pendidikan agama di Indonesia bervisi menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, mencerminkan budaya dan filosofis yang lama mengakar di masyarakat Indonesia. Sebagai contohnya Pendidikan Agama Islam bertujuan membentuk pribadi Muslim yang bertakwa, cinta kasih kepada sesama dan tanah air.

Sedangkan untuk sistematika dan budaya evaluasi pembelajaran di Indonesia dan Finlandia memiliki perbedaan di antaranya jika di Finlandia evaluasi pembelajaran mereka bersifat formatif dan holistik dengan fokus perkembangan berkelanjutan siswa. Evaluasi dilakukan melalui berbagai metode adaptif dan mendukung kebutuhan individu. Sistem ini dirancang guna mendukung kesejahteraan mental dan emosional siswa serta memastikan mereka siap menghadapi tantangan di masa depan. Dalam kebijakannya, evaluasi di Finlandia sangat mendukung fleksibilitas dan inklusivitas. Sedangkan sistematika evaluasi pembelajaran di Indonesia bersifat sumatif dan berfokus pada pencapaian nilai akhir siswa melalui ujian dan peringkat. Hal ini kerap kali

menimbulkan dampak buruk pada psikologis terutama pada anak yang ternyata mendapati prestasi yang rendah. Sayangnya evaluasi di Indonesia tidak memperhatikan proses pembelajaran yang berkelanjutan dan perkembangan individu siswa secara menyeluruh sehingga hanya menilai hasil akhirnya dan menjadi patokan sebagai tingkat prestasi bukan pada pembentukan karakter dan penguatan intelektual masing-masing individu.

DAFTAR PUSTAKA

Absawati, Himami. "Telaah Sistem Pendidikan Di Finlandia : Penerapan Sistem Pendidikan Terbaik Di Dunia Jenjang Sekolah Dasar." *Center Of Education Journal* 3, no. 1 (2022).

Adha, Maulana Amirul, Saverinus Gordisona, Nurul Ulfatin, dan Achmad Supriyanto. "Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia dan Finlandia." *Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan* 3, no. 2 (2019): 145. <https://doi.org/10.29240/jsmp.v3i2.1102>.

Adlini, Miza Nina, Dkk. "metode penelitian kualitatif studi pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6 (2022).

Aikonen, Risto. *Koulun Ortodoksinen Uskonnonopetus: Haasteellisesta Menneisyydestä Uusiin Oppimisympäristöihin*. Helsingin Yliopistoo: Uskontotieteen Laitos,

2007.

Anisa Astra, Jingga, Mardiyana, dan Triyanto. "Pendekatan dan Penilaian Pembelajaran pada Kurikulum 2013 Revisi 2017 yang Mendukung Peningkatan Kemampuan Koneksi Matematis Siswa." *Jurnal Elektronik Pembelajaran Matematika* 5, no. 3 (2018).

Asrul, Abdul Hasan Sarigih, dan Mukhtar. *Evaluasi Pembelajaran. Perdana Publishing*. Medan: Perdana Publishing, 2022.

Bisri, H, dan M Ichsan. "Penilaian Otentik dengan Teknik Nontes di Sekolah Dasar Authentic Assessment with Nontest Technique in Primary School." *Jurnal Sosial Humaniora* 6, no. 5 (2015): 81–93.

Dan, Kurikulum, dan Pendidikan Di. "ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM EVALUASI PENDIDIKAN PADA" 7, no. 1991 (2022).

Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.

Dwi, Silvia. "Analisis Perbandingan Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di SD Negeri 6 Pangkalpinang." *EDOIS: International Journal of Islamic Education* 1 (2023).

Fajri, T a Al, E D Novita, D Dayana, dan ... "Analisis kritis sistem evaluasi pendidikan Indonesia." *Ma'arif*

- Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies (MJEMIAS)* 1, no. 1 (2022): 1–11.
- Fajri, Taufiq Akbar Al, Evi Diyah Novita, Dayana, Anisa Agustina Rahayu, Aliffiah Elsa Fitri Ramadhani, Rahayu, Royhan Febriyanta Sembiring, dan Abdul Kadir. "Analisis Kritis Sistem Evaluasi Pendidikan Indonesia." *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies (MJEMIAS)* 1, no. 1 (2022): 1–11.
- Hasibuan, Ahmad Tarmizi, Wilna Wulan Suci Simatupang, Riska Rudini, dan Sofiah Ani. "Implementasi Sistem Pendidikan Terbaik Dunia di Jenjang Anak Usia Dasar Telaah Sistem Pendidikan Finlandia." *Jurnal Pembelajaran dan Matematika Sigma (Jpms)* 9, no. 1 (2023): 133–36.
- Hidayah, Ulil. "Rekonstruksi Evaluasi Pendidikan Moral Menuju Harmoni Sosial." *Jurnal Pedagogik* 05, no. 01 (2018): 69–81.
- Ismail, Muhammad Ilyas. *Evaluasi pembelajaran: Konsep Dasar, Prinsip, Teknik dan Prosedur*. Disunting oleh Prajna Vita. Depok: Rajagrafindo Persada, 2020.
- Kemendikbud. "Mendikbud Tetapkan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan 'Merdeka Belajar.'" [kemdikbud.go.id](https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/mendikbud-tetapkan-empat-pokok-kebijakan-pendidikan-merdeka-belajar), 2019. [https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/mendikbud-tetapkan-empat-pokok-](https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/mendikbud-tetapkan-empat-pokok-kebijakan-pendidikan-merdeka-belajar)
- [kebijakan-pendidikan-merdeka-belajar](https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/mendikbud-tetapkan-empat-pokok-kebijakan-pendidikan-merdeka-belajar).
- . No Title (2020).
- Koesmawardhani, Nograhany Widhi. "Profesor Finlandia: Perhatikan Kualitas Pengajaran, Bukan Lamanya Belajar." *detiknews*, 2016. <https://news.detik.com/wawancara/d-3323020/profesor-finlandia-perhatikan-kualitas-pengajaran-bukan-lamanya-belajar>.
- L, Idrus. "Evaluasi dalam Proses Pembelajaran." *ADAARA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2019): 920–35.
- Lyhykäinen, Kaarina. "Praksis Vai Gnoosis?: Ortodoksien Uskonnon Opettajien Käsityksiä Oppiaineen Tehtävistä." *Teologinen Aikakauskirja* 114, no. 5 (2009): 471–77.
- Magdalena, Ina, Hadana Nur Fauzi, dan Raafiza Putri. "Pentingnya Evaluasi dalam Pembelajaran dan Akibat Memanipulasinya." *Bintang: Jurnal Pendidikan dan Sains* 2, no. 2 (2020): 249–61. <https://doi.org/10.30640/dewan-tara.v2i1.722>.
- Mustoip, Sofyan. "ANALISIS PENILAIAN PERKEMBANGAN DAN PENDIDIKAN KARAKTER DI KURIKULUM MERDEKA SEKOLAH DASAR." *PANDU: Jurnal Pendidikan Anak dan Pendidikan Umum* 1, no. 3 (2023).

- <https://doi.org/10.59966/pandu.v1i3.470>.
- Nurhasanah, Neni, Ayu Azhari, Khairani Berutu, Tegar Jaya Putra, Razak Hardinata Hasibuan, dan Inom Nasution. "Evaluasi Pembelajaran Dikelas." *Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa* 1, no. 2 (2023): 257–70.
- Nurritzqi, Afida. "Karakteristik Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Prespektif Kebijakan Pendidikan." *Bintang: Jurnal Pendidikandan Sains* 3, no. 1 (2021).
- Onniselkä, Suaad. *Islamin Opetus Koulussa*. Turku: Savukeidas, 2011.
- Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet. *Oppivelvollisille Tarkoitettun Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet*. Helsinki: Opetushallitus, 2004.
- Popham, W. James, dan Evi L. Baker. *Teknik Mengajar Secara Sistematis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Pyysiäinen, Markku. *Yksi Oppiaine, Seitsemän Opetussuunnitelmaa*. Helsinki: Helsingin Yliopiston Soveltavan Kasvatustieteen Laitos, 2000.
- Rafsel, Tas'adi. "Pentingnya Etika dalam Pendidikan." *Ta'dib* 17, no. 2 (2014): 189–98. <https://doi.org/10.31958/jt.v17i2.272>.
- Rahman, Arief Aulia, dan Cut Eva Nasryah. *Evaluasi Pembelajaran. Uwais Inspirasi Indonesia*, 2019.
- Sawaluddin, dan Muhammad Sidiq. "Langkah-Langkah dan Teknik Evaluasi Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam." *Jurnal PTK & Pendidikan* 6, no. 1 (2020): 13–24. <https://doi.org/10.18592/ptk.v6i1.3793>.
- Seine, Harri. *Uskonnonopetus Suomen Oppivelvollisuuskoulussa 1900-Luvulla*. Turku: Turun Yliopisto, 2000.
- Suprayitno, Adi, dan Wahid Wahyudi. *Pendidikan Karakter di Era Milenial*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Suyono, Akhmad, Andri Eko Prabowo, dan Nurhuda Nurhuda. "Sistem Pendidikan Eropa: Studi Sistem Pendidikan Di Finlandia." *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi* 11, no. 2 (2023): 88–96.
- Syahidin. *Aplikasi Metode Pendidikan Qurani dalam Pembelajaran Agama di Sekolah*. Tasikmalaya: Ponpes Suryalaya Tasikmalaya, 2005.
- Tafsir, Ahmad. *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*. Bandung: Mimbar Pustaka, 2004.
- Urfah, Noviyanti, Wirda Adelia, dan Nur Syamsiyah. "Analisis Perbandingan Sistem Evaluasi Pendidikan pada Kurikulum 2013 dan Pendidikan di Finlandia." *Eduscience: Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 02 (2022): 113–

- | | |
|--|---|
| 19.
https://doi.org/10.47007/edu.v7i02.5540 .
Winata, Koko Adya, Uus Ruswandi, dan Bambang Samsul Arifin.
"Pendidikan Agama Islam (PAI) | Dalam Kurikulum Nasional." <i>Attractive : Innovative Education Journal</i> 3, no. 2 (2021).
https://doi.org/10.51278/aj.v3i2.248 . |
|--|---|